

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KELAYAKAN HIDUP MASYARAKAT

Lino Pereira, Bambang Supriyono, Mochamad Makmur

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email. linoangelina123@gmail.com

Abstrak: Perencanaan pembangunan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Peraturan Pemerintah No.10/2007, yang mengesahkan kebijakan tentang perumahan dan permukiman Nasional merupakan sebuah dokumen yang merangkup secara rinci aspek-aspek yang sangat penting untuk perumahan dan permukiman di Timor-Leste. Studi ini menemukan bahwa Penanganan masalah permukiman di Desa Comoro merupakan tugas dari pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi yang terkait Untuk menunjang pembangunan permukiman. Maka ditetapkan beberapa program kegiatan pembangunan permukiman di setiap desa salah satunya di Desa Comoro. yaitu: Perencanaan teknis; pembangunan perumahan penduduk; Pemeliharaan rutin jaringan jalan; Pemeliharaan sanitasi dan drainase serta jaringan listrik. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses perencanaan pembangunan permukiman dan mendiskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro, Municipio Dili Timor – Leste. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan di lingkungan permukiman terdapat kondisi-kondisi fisik yang menjadi penyebab langsung terjadinya kekumuhan, antara lain: aspek perumahan; aspek sanitasi dan lingkungan; jaringan jalan dan sistem transportasi. maka diperlukan beberapa langkah untuk merencanakan pembangunan permukiman yang layak.

Kata kunci: Perencanaan, Pembangunan, Permukiman, Peningkatan Kelayakan hidup masyarakat

Abstract: *Development planning is an act done with the intention to make change for the better. Government Regulation No.10 / 2007, which endorsed the policy of national housing and settlements is a detailed document that extend to aspects that are very important for housing and settlement in Timor-Leste. The study found that the handling of the problem of settlements in the village of Comoro is the duty of the Ministry of Public Works and the agencies involved to support the construction of settlements. Then set some settlement activity programs in every village one of them in the village of Comoro. namely: technical planning; construction of residential population; Routine maintenance of the road network; Maintenance of sanitation and drainage and electrical networks. The objective of research to analyze and describe the process of development planning of settlements and describing the role of government in development planning of settlements in the village of Comoro, Dili Municipio Timor - Leste. This study used a qualitative descriptive method. The results showed in the neighborhoods there are physical conditions the direct cause of the squalor, among others: housing aspects; sanitation and environmental aspects; road networks and transportation systems. then take a few steps to plan for the construction of decent housing.*

Keywords: *Planning , Development , Settlement , Improvement Feasibility life*

PENDAHULUAN

Perencanaan perlu dilakukan mengingat perencanaan merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan suatu organisasi termasuk organisasi Negara. Sebagai langkah awal untuk implementasi terhadap kegiatan pembangunan (action plan). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan dapat diterapkan (Ryadi dan Bratakusumah, 2004:6) karena perencanaan tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia. (Tjokroamidjojo. 1995). Dalam konteks perencanaan di Timor Leste, Dengan pendekatan sistem Perencanaan yang sentralistik atau “top down” dimana pembangunan tersebut seolah – olah dilaksanakan atau dijalankan oleh pemerintah pusat belum mencerminkan

tingkat pemberdayaan dan atau kelayakan daerah dan terlebih masyarakat yang berada di daerah perkotaan khususnya di Kota Dili.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, maka Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasarkan skala prioritas dan biaya, peluang bagi proyek-proyek pembangunan. Dalam Peraturan pemerintah No.10/2007, yang mengesahkan kebijakan tentang perumahan dan permukiman Nasional. ini adalah sebuah dokumen yang merangkup secara rinci aspek-aspek yang sangat penting untuk perumahan dan permukiman di Timor-Leste dalam hal ini ditetapkan beberapa program kegiatan pembangunan permukiman di setiap desa di Kota Dili salah satunya Desa Comoro antara lain: (1) perencanaan teknis; (2) pembangunan perumahan penduduk; (3) pemeliharaan rutin jaringan jalan raya; (4) pemeliharaan saluran sanitasi dan drainase serta jaringan listrik; (5) pembangunan sarana hunian bagi masyarakat tak mampu.

Menurut pengamatan bahwa masalah permukiman memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, Usaha memperoleh perumahan diluar jangkauan mereka karena sistem hukum yang tidak familiar membuat masyarakat mengambil tindakan sendiri – sendiri dan menduduki tanah milik Negara atau swasta. Dengan hal itu maka masyarakat seringkali melakukan pendekatan menolong diri sendiri dengan asas gotong royong. Menurut (Sadana. 2014), permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia. Lingkungan tempat tinggal manusia merupakan bagian dari lingkungan alam. Manusia adalah bagian dari alam dan menetap di lingkungan tempat tinggal. Masalah – masalah lain yang muncul seperti kepemilikan tanah, sarana hunian, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, banjir, kondisi jalan, masyarakat yang hidup di tempat kumuh.

Di Dili (STL News, 2013) permukiman menempati 82% dari daerah perkotaan, dan 75% dari total perumahan terdapat di daerah yang tidak terencana dan tanpa jaminan pelayanan dasar, Berdasarkan jumlah air yang ditargetkan tersedia di tempat penampungan yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota Dili, maka air bersih di kota Dili seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Namun, kenyataan yang ada masih terdapat banyak masyarakat yang belum mendapatkan air bersih dan bahkan banyak masyarakat yang mengeluh dalam mendapatkan akses air bersih. penyediaan akses listrik terhadap masyarakat yang ada di kota Dili khususnya desa Comoro tingkat operasional masih rendah, hal ini karena kurangnya tenaga teknik untuk mengontrol dan mengoperasikan generator listrik yang berkapasitas besar. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Secara umum penggunaan lahan Desa Comoro dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut: 1) penggunaan lahan, sebagai lahan permukiman; 2) penggunaan lahan sebagai lahan pertanian dan industry; 3) penggunaan lahan sebagai fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata dan ruang terbuka hijau.

Jenis konstruksi bangunan rumah di wilayah studi terbagi menjadi tiga jenis yaitu rumah permanen, semi permanen dan sementara. Dari hasil pengamatan persentase jumlah rumah permanen dengan konstruksi seluruh bahan berupa blok (tembok) di Suco Comoro sebesar 68 %, rumah semi-permanen adalah 20 % dan rumah sementara 12%. Keberadaan permukiman di Desa Comoro yang terkesan kumuh memberi dampak negatif terhadap tata ruang kota, secara umum dampak yang diakibatkan adalah degradasi lingkungan hidup dan degradasi kehidupan sosial. Degradasi lingkungan hidup ini merupakan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Masalah – masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang terbuka hijau yang semakin berkurang, drainase semakin buruk, sirkulasi terganggu, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Di Desa Comoro terdapat 12 unit Sekolah Dasar, 6 unit Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, 4 unit Sekolah Menengah Atas, 1 unit Perguruan Tinggi (Institute of Bussines) dan beberapa tempat

pendidikan Non Formal yang menyebar di Desa comoro, kondisi umum sekolah yang ada di Desa Comoro memang pada umumnya mengalami Hal serupa dimana infrastruktur yang ada di hampir bangunan sekolah tidak memiliki kelengkapan fasilitas, untuk meningkatkan kualitas bagi pendidikan bagi siswa bukan saja melihat dari metoda pengajaran atau kurikulum pendidikan melainkan penyediaan sarana prasarana sekolah.

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Desa Comoro meliputi Plaza, toko/swalayan, pasar, toko bunga, toko kue dan roti (Bakery), toko alat tulis kantor, warung, bengkel dan lain sebagainya yang tersebar di Suco ini. Pola mata pencaharian penduduk yang berdagang mempengaruhi pula dalam hal penataan hunian mereka masing-masing dan hampir semua penduduk yang berprofesi sebagai pedagang menggunakan rumah mereka sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berjualan dan sebaliknya.

Tempat Pembuangan Sampah yang terdapat di Desa Comoro sebanyak 85 buah. Pola pengumpulan sampah di Kawasan Desa Comoro dilakukan sesuai waktu pengangkutan sampah yaitu pagi sampai siang. Saat ini sistem pengelolaan sampah di wilayah Desa Comoro belum cukup memadai, hal ini karena prasarana moda angkutan yang masih terbatas dalam kegiatan pengangkutan sampah sehingga terjadi ketidak maksimalan pengangkutan sampah. Selain itu terdapat pula tingkah laku masyarakat yang buang sampah tidak sesuai dengan jadwal pembuangan sampah, hingga akhirnya sampah yang semestinya pada siang hari sudah kosong malah ditemukan di dalam sampah pada waktu selesai pengangkutan.

Jaringan drainase wilayah Desa Comoro hanya terdapat pada rumah-rumah di sepanjang jalan utama masuk wilayah permukiman, sedangkan untuk rumah yang berada di dalam gang ataupun yang tidak berada di muka jalan tidak memiliki drainase untuk mengalirkan air, sehingga pada musim hujan sering terjadi banjir, Sistem penyaluran Limbah kotoran dari beberapa pusat perdagangan langsung disalurkan ke saluran drainase umum. Namun limbah rumah tangga Rumah Tangga dan yang berasal dari air hujan hanya menyalurkan di kawasan sekitar rumah, karena tidak memiliki saluran drainase dan atau sumur resapan. kebanyakan pembelian harga pulsa listrik tergantung pada tingkat pemakaian di rumah tangga, namun Terdapat pula perilaku masyarakat yang tidak membeli pulsa tetapi listriknya tetap digunakan layaknya masyarakat lain yang membeli pulsa, hal itu dilakukan dengan cara memotong kabel penghubung dari meteran yang sudah disegel oleh pihak EDTL.(pusat tenaga Listrik Nasional)

Jalan di wilayah Desa Comoro terdiri dari Rua de Nicolao Lobato yang menghubungkan Rua de Delta Comoro yang termasuk jalan Arteri. Dan Rua de Praia dos Coceiros termasuk jalan kolektor primer, sedangkan jalan lainnya termasuk jalan lingkungan. Jalan masuk (pergerakan internal) dalam wilayah Comoro sebagian jalan aspal dan yang lainnya masih berupa jalan biasa (non aspal) yang cukup memprihatinkan dimana terdapat banyak jalan yang berlubang dan air selalu tergenang di jalan bila musim hujan tiba. Adapun di beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan lebar pendesterian yang disebabkan olen beberapa pedagang kaki lima dan penjual pakaian obralan di pinggir jalan lingkungan sehingga mengakibatkan keadaan tidak teratur dan semerawut, hal ini menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran akan terjadi kecelakaan.

Penanganan terhadap masalah permukiman akibat dari pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang terjadi di Dili khususnya Desa Comoro, belum ada penanganan secara serius hal ini berdampak pada pola permukiman yang tidak tertata dengan baik. Dengan ini maka kegiatan penyelenggaraan program perencanaan pembangunan permukiman sangatlah dibutuhkan sedangkan strategi pembangunan permukiman yang direncanakan sebagai upaya peningkatan kelayakan hidup dan

kesejahteraan masyarakat telah digariskan dalam Undang-Undang dan tertuang dalam dokumen perencanaan PEDN. (*Plano Estrategico Desemvolvimento Nasional*).

Penetapan Tujuan dari perencanaan pembangunan permukiman ini dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai program penanganan masalah permukiman untuk mengejar target pembangunan *Dili Master and Urban Plan*. Program kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Jepang melalui Sektor swasta dalam hal ini JICA (*Japan International Cooperation Agency*) untuk menyusun program perencanaan pembangunan permukiman. sebagai suatu target untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di setiap daerah. Dalam peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan lain yang sudah disahkan memberi orientasi dan arahan kegiatan kerja dalam mengimplementasikan suatu program kerja dengan hasil yang maksimal.

Pemerintah Timor-Leste meminta Pemerintah Jepang untuk mempersiapkan visi pembangunan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan untuk merumuskan tingkat kelayakan hidup masyarakat melalui perencanaan pembangunan permukiman. Menanggapi permintaan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah menandatangani *Record of Discussion* untuk pelaksanaan " Proyek untuk Studi tentang Rencana pembangunan permukiman di Republik Demokratik Timor Leste.

Team / komisi yang menyusun agenda tentang proses persiapan penyusunan penanganan masalah perumahan dan permukiman mengacu pada Undang-undang RDTL Pasal 58 dan peraturan pemerintah, serta peraturan lain. Koordinator komisi ini dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat JICA untuk bersama-sama menyusun program perencanaan pembangunan permukiman serta menyampaikan surat, kepala kecamatan dan direktur perwakilan kementerian yang mewakili pekerjaan penanganan masalah perumahan dan permukiman di Desa Comoro. untuk menyampaikan informasi tentang proses penyusunan perencanaan pembangunan permukiman dan jumlah pilihan prioritas proyek.

Dan sampai pada rumusan masalah 1) Bagaimana Proses perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro sebagai upaya peningkatan kelayakan hidup masyarakat? 2) Bagaimana Peranan pemerintah dalam perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro? 3) Faktor – faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan pembangunan permukiman baru di Desa Comoro, Municipio Dili?

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan proses perencanaan pembangunan permukiman baru di Desa Comoro, Municipio Dili Timor – Leste dan untuk mengetahui dan mendiskripsikan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan permukiman baru sebagai upaya peningkatan kelayakan hidup masyarakat serta untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan pembangunan permukiman baru di Desa Comoro, Municipio Dili, Timor – Leste.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metedologi kualitatif yang menggunakan hasil pengamatan (observasi), wawancara dan penelaahan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan Pendekatan kualitatif ini untuk memudahkan penggalan secara mendalam fenomena dari pada unsur-unsur Perencanaan Pembangunan Permukiman sebagai upaya peningkatan kelayakan hidup masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan informasi sebagai kunci utama dalam penelitian, serta menghimpun informasi melalui pengamatan langsung di lokasi selama

beberapa minggu, kemudian melakukan beberapa wawancara dengan informan dan beberapa orang lainnya yang ditunjuk oleh informan dan juga penelaahan dokumen berupa dokumen penyusunan perencanaan pembangunan permukiman, dan penelaahan terhadap Peraturan Pemerintah No.10/2007 dan peraturan lain yang mendukung Undang-Undang Timor-Leste pasal 58 tahun 2002.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data analisis model interaktif menurut (Milles dan Huberman dalam sugyono. 2014). Dimana dijelaskan bahwa dalam model interaktif ini ada tiga jenis kegiatan analisis, dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat “sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan bukanlah suatu proses perubahan yang bersifat tetap dan statis melainkan suatu proses perubahan yang eksploitasi sumber daya alamnya, arah investasinya, orientasi perkembangan teknologi, dan pengembangan kelembagaannya yang konsisten untuk pemenuhan kebutuhan pada saat sekarang ini dan kebutuhan di masa yang akan datang (Tjokrowinoto. 1993).

Proses perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro

Proses perencanaan yang dilaksanakan di Municipio Dili khususnya di Desa Comoro harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan unsur-unsur perencanaan yang ada agar mendapatkan hasil yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Tinjauan Keadaan Lingkungan Permukiman

Tinjauan keadaan dilakukan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi wilayah sesuai dengan lingkup perencanaan yaitu meliputi tinjauan tentang keadaan wilayah perencanaan (kondisi eksisting site), permasalahan yang timbul dan potensi yang dimiliki. Dari beberapa tinjauan keadaan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan pokok yang menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan. (Ryadi dan Deddy. 2004) mengemukakan tentang pentingnya mengetahui potensi dan masalah dalam perencanaan pembangunan daerah karena fakta di lapangan berupa potensi dan masalah merupakan suatu pijakan awal dalam proses penyusunan rencana yang berguna sebagai dasar analisis berikutnya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kondisi permukiman menjadi salah satu alasan dan latar belakang dilakukannya perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan keadaan dilakukan melalui pengamatan di lapangan oleh tim koordinasi bersama dengan otoritas lokal; melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Comoro dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; mengkaji data statistik sarana dan prasarana permukiman mengenai kondisi eksisting dan perkembangan hidup masyarakat dalam lingkungan sosial dan infrastruktur untuk dicari kemungkinan penyebab yang berhubungan dengan perkembangan yang terjadi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dalam melakukan tinjauan keadaan, permasalahan dapat dilihat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan potensi sumber daya atau sarana dan prasarana yang ada sebagai dukungan untuk merencanakan pembangunan suatu permukiman.

Penetapan Tujuan Rencana dan Pemilihan Strategi Pembangunan Permukiman di Desa Comoro

Sesuai dengan pendapat (Tjokroamidjojo. 1995) bahwa penetapan tujuan berdasarkan tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui. Jika melihat pada cara penetapan tujuan yang dilakukan oleh tim koordinasi yaitu memahami adanya realita permasalahan permukiman di lapangan dan terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat dari kondisi permukiman yang terkesan kumuh, serta melihat pada peluang yang ada yaitu upaya untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat.

Menurut (Conyers dan Hills. 1990) bahkan meletakkan tujuan sebagai tahap awal dalam siklus perencanaan karena melalui tujuan maka dapat disusun langkah-langkah maupun strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian maka Strategi yang digunakan dalam rencana pembangunan permukiman oleh tim koordinasi yang dikepalai Dinas Pekerjaan Umum, pada intinya adalah upaya untuk meningkatkan pola kehidupan masyarakat yang lebih layak. Pemilihan strategi tersebut mengacu pada tujuan yang ingin dicapai yaitu 1) Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang baru dan atau yang diremajakan; 2) meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung sebagai upaya meningkatkan kelayakan hidup masyarakat di lingkungan permukiman; 3) Menciptakan keseimbangan permukiman di kota maupun di desa dimasa yang akan datang; 4) Mendorong terciptanya hubungan yang erat antara kota dan desa. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai tujuan berikutnya yaitu upaya peningkatan kehidupan yang lebih layak.

Identifikasi Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tata cara atau tata kerja suatu kegiatan akan berdampak positif terhadap kinerja Pemerintah atau organisasi untuk tetap melayani dan membantu masyarakat demi kesejahteraan bangsa. Menurut (Tjokroamidjojo. 1995) bahwa rencana pembangunan supaya mendapat kekuatan pelaksanaannya, perlu mendapatkan status formal atau dasar hukum tertentu, menurut Conyers dan Hills (1990:15) menggambarkan proses perencanaan melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan, dimana aktivitas yang satu diikuti aktivitas yang lainnya, yaitu diawali dengan pengambilan kebijakan (*policy making*), dikembangkan melalui proses perencanaan, dan kemudian diimplementasikan.

Maka dari itu Kegiatan pembangunan permukiman di Desa Comoro merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk merespon dokumen perencanaan strategi pembangunan nasional (2010-2030) dimana kajian terhadap kebijakan pembangunan permukiman di Desa Comoro dimulai dari Undang-Undang Timor-Leste Pasal 58 tahun 2002. Menurut Undang-undang tersebut merupakan pemberian hak bagi warga untuk mendapat rumah tinggal dan lingkungan permukiman yang layak dan sehat. Serta kebijakan teknis dalam Peraturan Pemerintah No.10/2007 dan peraturan lain yang mendukung Undang-Undang Timor-Leste pasal 58 tahun 2002. Sehingga penanganan masalah permukiman sudah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyusunan Program Perencanaan Pembangunan Permukiman

Tahap penyusunan program perencanaan sudah merupakan tahap persiapan pelaksanaan dimana semua data identifikasi baik itu sumber daya anggaran, kebijakan maupun sumber data lain yang dikumpulkan sudah dianalisis dan dijadikan skala prioritas kegiatan. (Abe. 2005), bahwa tahap-tahap dalam perencanaan pembangunan adalah penyelidikan, perumusan, menentukan tujuan dan target, mengidentifikasi sumber daya (daya dukung), merumuskan rencana kerja, dan menentukan anggaran yang hendak digunakan dalam realisasi rencana. Dalam penyusunan perencanaan program

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam membentuk Tim Koordinasi sudah tentu dimulai dengan adanya kegiatan perencanaan awal.

Dari hasil penelitian penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Direksi Nasional Perumahan dan Tata Kota, yang diawali dengan pengumpulan data kasar yang dilakukan oleh masing-masing bidang teknis yang ada di Direksi tersebut dengan dibantu oleh bidang teknis di Direksi lain yang mempunyai hubungan kerja dalam masalah permukiman untuk dirumuskan dalam suatu rencana kegiatan yang akan diusulkan.

Maka penentuan prioritas penanganan lingkungan permukiman, dalam hal ini sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) peningkatan kondisi bangunan sarana hunian dapat dilakukan dengan menata bangunan perumahan melalui perencanaan tata ruang dusun dan desa; 2) meningkatkan pelayanan jaringan infrastruktur khususnya jaringan utilitas di Desa Comoro yang dirasa masih rendah, hal ini yang ditingkatkan adalah Peningkatan kualitas sanitasi dengan optimalisasi MCK atau jaringan air bersih yang dapat didistribusikan ke seluruh warga desa, Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan dengan upaya perbaikan sarana-prasarana TPS, Perbaikan sistem pengelolaan limbah cair dan padat dengan membangun wadah pembuangan limbah yang baik dan sehat; 3) Penentuan ruas jalan yang berfungsi sebagai akses utama atau jalan arteri primer dan jalan kolektor kemudian perbaikan akses ruas jalan penghubung antara Dusun ke jalan kolektor dan perbaikan ruas jalan di dalam desa; 4) Penyusunan perencanaan umum dan penyusunan standar teknis tentang peraturan perundang-undangan permukiman.

Peranan Pemertintah dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman

Peranan pemerintah sebagai koordinator bilamana ditinjau dari tugas pokok dan fungsi sehingga pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab untuk membentuk Tim Koordinasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah hal ini akan mewujudkan suatu pencapaian koordinasi yang baik dan menyeluruh dalam mengatasi persoalan permukiman. Kendati demikian, menurut (Lincoln. 1999). Bahwa untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Unsur perencanaan pembangunan permukiman yang mengkaji elemen-elemen permukiman serta melibatkan banyak lembaga atau instansi maka peranan pemerintah sebagai koordinator sangat dibutuhkan agar bias mengatasi kecenderungan terjadinya *divergensi*, atau dalam hal ini kemungkinan terjadinya ego sektoral di antara lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Hal ini ditegaskan (Sjafrizal. 2014) bahwa dokumen perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan dokumen publik yang proses penyusunan dan penetapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan peran serta masyarakat dalam penyusunan perencanaan, biasanya proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan, tetapi juga secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat.

Peranan pemerintah yang sangat penting selain sebagai koordinator adapula sebagai Fasilitator dimana peranan pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pembinaan, dan peningkatan ketrampilan dan kapasitas dalam berbagai bidang dan pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2007 tentang kebijakan Nasional Permukiman Timor Leste bahwa Pemerintah akan berperan sebagai fasilitator, yang mempunyai fungsi mengkapasitasi dan merangsang setiap rumah tangga, kelompok masyarakat, komunitas sipil, sektor pribadi formal serta perdagangan

informal, dalam arti memikul tanggung jawab secara langsung mengenai permukiman.

Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan Pembangunan Permukiman

faktor-faktor yang mendukung dalam perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro adalah faktor regulasi atau peraturan dimana aturan atau kebijakan adalah merupakan suatu landasan yang digunakan oleh suatu daerah dalam perencanaan pembangunan, (Tjokroamidjojo. 1995), secara umum salah satu unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang merupakan unsur dasar dari pada seluruh rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok lainnya. Faktor kedua adalah struktur ruang permukiman terletak pada jaringan jalan dan sirkulasi lingkungan suatu permukiman. Faktor pendukung ketiga adalah dengan kegiatan perencanaan pembangunan permukiman di Desa Comoro menjadi sinergitas antara pemerintah, usaha bisnis dan masyarakat dalam pembangunan yang makin serasi serta memberi tempat bagi semua pihak untuk mengembangkan potensi sumber dayanya masing-masing.

Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam perencanaan pembangunan permukiman yaitu sumber daya manusia dimana salah satu faktor keberhasilan pembangunan yaitu keberhasilan manusianya. (Harjanto. 2011), ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, dan kualitas kehidupannya seperti perumahan dan permukiman yang sehat; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan; (4) pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Faktor penghambat kedua adalah komunikasi antar instansi terkait dengan perencanaan pembangunan permukiman dimana komunikasi pada setiap instansi kementerian yang berperan dalam menangani masalah permukiman tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan ketidakmaksimalnya perencanaan pembangunan permukiman.

KESIMPULAN

Dalam proses perencanaan pembangunan permukiman seringkali terdapat ketidakseriusan dan ketidak tekunan tim koordinasi dalam merencanakan pembangunan permukiman terutama dalam rapat koordinasi untuk membahas proses perencanaan pembangunan permukiman.

Dalam Tinjauan Keadaan lingkungan permukiman terdapat ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman.

Dalam penyusunan Program Perencanaan di Bidang Permukiman masih terdapat campurtangan politik dan pihak yang berkepentingan dalam kegiatan perencanaan pembangunan permukiman.

Peranan Pemertintah dalam Perencanaan Pembangunan Permukiman masih terdapat kendala adalah pemerintah belum memiliki penanganan yang serius dalam bidang penanganan potensi sumber daya di Desa Comoro. Baik alam maupun manusia, sebagai nilai tambah dalam pembangunan daerah atau Negara. Sejauh ini pemerintah masih belum menetapkan standar atau regulasi dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap sarana hunian maupun prasarana infrastruktur permukiman sehingga dapat mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Komunikasi antar instansi terkait dengan perencanaan pembangunan permukiman dimana koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat sering mendapat masalah selain itu dalam mengidentifikasi kondisi di lapangan dengan penyesuaian data yang ada di Instansi kementerian lain yang terlibat dalam tim koordinasi sering mengalami kontradis dalam dokumen rencana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini saran-saran dan masukan sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut: Dalam proses perencanaan pembangunan permukiman, perlunya keseriusan dan ketekunan tim koordinasi dalam merencanakan pembangunan permukiman.

Dalam meninjau keadaan lingkungan permukiman perlu adanya pengendalian tingkat urbanisasi dari desa ke kota Dili, terutama di desa Comoro sehingga dalam pengimplementasian program perencanaan *Dili Urban Master Plan* dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah hendaknya memiliki konsistensi dan kesadaran untuk tidak melibatkan diri secara politik dan atau melibatkan pihak lain untuk ikut campur urusan pembangunan permukiman maupun program pembangunan lain.

Pemerintah hendaknya memiliki keseriusan dalam menangani sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Desa Comoro, hal ini dapat dijadikan nilai tambah dalam pembangunan daerah atau Negara, selain itu, pemerintah hendaknya menetapkan standar atau regulasi dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap sarana hunian maupun prasarana infrastruktur permukiman sehingga dapat mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Perlunya menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dan intensif dari setiap instansi kementerian dan lembaga swadaya dalam menangani program perencanaan pembangunan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander.,2005. “ *Perencanaan Daerah: memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama.Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin.,1999 “ *Pengantar Perencanaan dan Ekonomi Daerah*.penerbit. BPFE, Yogyakarta.
- Conyers, Diana.,1991. “ *An Introduction Planning in The Third World, by John Wiley & sons Ltd.1994, Terjemahan Drs. Susestawan SU: “ Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga.” : suatu pengantar*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Harjanto, Imam.,2011. “ *Teori Pembangunan* “Penerbit Universitas Brawijaya Press (UB Press). [hal: 111,120].
- Ryadi dan Bratakusumah, Supryadi Deddy,2004. “ *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*,Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2004.
- Sadana, Agus S.,2014 “ *Perencanaan Kawasan Permukiman*”. Penerbit, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sugiyono., 2009. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*” Penerbit ALFABETA BANDUNG. [hal, 2 dan 4]
- Tjokroamidjojo, Bintoro.,1995. “ *Pengantar Administrasi Pembangunan.*” PT Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta 11420.
- Tjokrowinoto, Moeljarto.,1993. “ *State of The Art, Ilmu Administrasi Negara*”, Makalah Pada Lokakarya Perkembangan Teori-teori Ilmu Politik di AIPI.
- Constitucao Republica Democratica de Timor Leste*, Pasal 1,ayat 5 tahun 2002, “ *Desentralizasaun* ”. Timor – Leste.

Peraturan Pemerintah no 10 tahun 2007. "*Tentang kebijakan Nasional permukiman*" Timor – Leste.

Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2010. "*Plano Estrategia o Desenvolvimento Nasional (Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional)*" Timor – Leste.

Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2007. "*Tentang kebijakan Nasional permukiman*" Timor – Leste.